

JURNAL

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG
MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG**



Diajukan Oleh :

APRILIA SIHOMBING

NPM	: 120511100
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG
MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG**

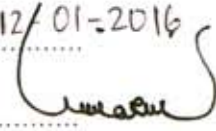


Diajukan Oleh :

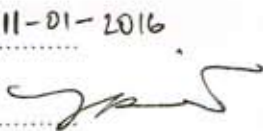
APRILIA SIHOMBING

NPM : 120511100
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing I,
Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum

Tanggal : 12/01-2016
Tanda tangan : 

Dosen Pembimbing II,
Dr.Anni Retnowati, S.H.,M.Hum

Tanggal : 11-01-2016
Tanda tangan : 

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG

Aprilia Sihombing

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : Sihombingapriliah@gmail.com

Abstract

Child neglect is one form of the worst treatment of the violence in a child. Based on human right point of view, neglect is violations and crime against children. Child neglect that is when the right of the child to grow up reasonably, right of the child to obtain a decent education, and the right to obtain adequate health service was not met due negligence, lack of parental understood because of inability or because of deliberate action. The type of research that is done is the normatif legal research i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. Research result and discussion that has writers do, can be drawn the conclusion that: the law No.23 of 2002 on child protection looks at the action as an act of child abandonment law violations that result in legal sanction are convicted with a can as set forth in law No.23 of 2002 on child protection. But in the case, the law enforcers are not acted to uphold the law No.23 of 2002 on child protection, in particular in the case of child abandonment was still under age.

Keywords: Criminal sanction, child neglect, biological child.

1. PENDAHULUAN

Menurut penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat serta hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi.¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa anak memiliki 4 hak, yakni terdiri atas hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Hak atas perlindungan terhadap

anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB III Pasal 58 ayat (1).

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk penelantaran. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh anak kandung selama orangtua kandungnya masih hidup. Orangtua memiliki kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk merawat dan menjaga anak agar dapat bertumbuh serta berkembang dengan baik. Namun faktanya, tidak semua orangtua bertanggungjawab terhadap anak kandungnya. Bahkan ada ayah kandung yang mengabaikan hak-hak anak kandung.

Kasus tentang penelantaran terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya semakin banyak terjadi. Hal ini menarik perhatian penulis sehingga penulis dalam melakukan penelitian ini mengangkat

¹Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 722.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Cetakan V, Nuansa Aulia, Bandung, Pasal 28B ayat (2).

pokok permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung oleh hakim di nilai penulis masih terlalu ringan sehingga belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku penelantaran mengingat masih terjadi kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan terhadap Bahan Hukum Primer dideskripsikan, selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal telah ada sinkronisasi sehingga digunakan prinsip penalaan hukum subsumsi. Sistematisasi secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam melakukan penelitian, dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal, interpretasi teleologis serta menilai hukum positif. Selanjutnya bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Ayah Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Bambang Poernomo berpendapat³ bahwa sanksi merupakan suatu ancaman pidana (strafbedreiging), dengan tujuan

agar aturan yang telah dibuat dapat ditaati⁴ sebagai akibat hukum dari pelanggaran

norma yang berlaku.³ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 bahwa hukuman terbagi atas 2(dua) jenis yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok

KUHP Pasal 10 mengatur macam hukuman pokok, terdiri atas: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.

b. Hukuman tambahan

KUHP membagi hukuman tambahan menjadi 3 (tiga) jenis, terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Hukum pidana mengatur 2(dua) macam sanksi, terdiri atas:

a. Sanksi pidana, merupakan hukuman berupa penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang melanggar aturan. Sanksi ini lebih menekankan pada unsur pembalasan terhadap pelaku pelanggar aturan agar yang bersangkutan menjadi jera.

b. Sanksi tindakan, merupakan sanksi yang diberikan dengan memberikan pertolongan agar pelaku pelanggar aturan dapat berubah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa ayah kandung merupakan orangtua laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak melalui ibu kandung anak tersebut.⁴ Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orangtua juga memiliki kewajiban yang terdiri atas:

a. Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta melindungi anak.

- b. Untuk melaksanakan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya.
- c. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dini pada usia anak-anak.
- d. Untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1).⁵

Pengertian pelaku tindak pidana diuraikan menjadi 3 (tiga), terdiri atas:

- a. Pelaku Tindak Pidana merupakan orang yang telah melakukan semua unsur tindak pidana (pleger).
- b. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger). Dalam hal ini orang tersebut sedikitnya berjumlah dua orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger) dan disuruh untuk melakukan tindak pidana (pleger). Jadi yang melakukan tindak pidana tersebut bukan orang itu sendiri melainkan ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- c. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger). Turut melakukan artinya secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan tindak pidana dan orang yang turut melakukan tindak pidana sedikitnya dilakukan oleh dua orang. Kedua orang tersebut secara bersama-sama melakukan semua perbuatan pelaksanaan unsur-unsur tindak pidana.⁶

Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri atas:

- a. Unsur objektif, merupakan unsur yang terdapat di luar pelaku yakni menyangkut tindakan yang dilakukan

pelaku harus dilakukan, yang terdiri atas: sifat melanggar hukum, kualitas pelaku dan kausalitas.

- b. Unsur subjektif, merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur tersebut terdiri atas:
 - 1) Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
 - 2) Adanya maksud dalam melakukan percobaan (Pasal 51 ayat (1) KUHP), seperti terdapat dalam kejahatan pencurian dan penipuan.
 - 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
 - 4) Adanya perasaan takut (Pasal 308 KUHP).⁷

Penerapan sanksi baru dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahap dalam proses beracara. Adapun tahap dalam proses beracara terdiri atas:

- a. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik terdiri atas: pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- b. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir 6a KUHP, penuntut umum merupakan pejabat negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang ini. Penuntut umum berfungsi untuk melakukan tindakan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum diatur dalam BAB IV KUHP Pasal 14.

- c. Pemeriksaan di pengadilan

KUHP membedakan ada 3 (tiga) macam acara pemeriksaan sidang pengadilan, yakni terdiri atas: acara

⁵uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.Cit., Pasal 26 ayat (1).

⁶H.Riduan Syahrani, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, cetakan ke-1, P.T.Alumni, Bandung, hlm. 168.

⁷Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 48-49.

pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat.

d. Pelaksanaan putusan pengadilan

Di dalam melaksanakan putusan pengadilan harus memenuhi syarat sahny suatu putusan pengadilan, yang terdiri atas:

- 1) Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
- 2) Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP)
- 3) Wajib memberitahukan hak-hak terdakwa (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Putusan pengadilan terbagi atas beberapa bentuk, yakni terdiri atas: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.⁸

B. Penelantaran terhadap anak kandung

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 ayat (1) mendefinisikan penelantaran sebagai suatu tindakan yang membiarkan seseorang terlantar. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang terhadap ruang lingkup rumah tangganya, karena berdasarkan perjanjian atau hukum yang berlaku mewajibkan orang tersebut untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangganya.

Pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud ialah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a

karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara tegas memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 9 ayat (1). Sanksi yang dimaksud ialah dengan pemberian sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 B bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁰ Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melakukan penelantaran terhadap anak khususnya bagi anak kandung berupa sanksi pidana, namun hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan penelantaran terhadap anak.

⁸Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia Utama, Jakarta, hlm. 17-18, 95-106, 178.

⁹UU No 23 tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 49.

¹⁰uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 B.

Pelaku yang melakukan penelantaran tersebut dilakukan oleh ayah kandung.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.¹¹ Anak dapat digolongkan menjadi beberapa macam, salah satunya adalah anak kandung. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak kandung sebagai anak yang lahir dari kandungan ibunya sendiri, bukan anak tiri maupun anak angkat.¹²

Anak kandung memperoleh haknya dari orangtua kandung sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Adapun asas hak-hak atas anak kandung terhadap orangtua kandungnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. Setiap anak kandung memiliki hak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraannya (Pasal 5).
- b. Setiap anak kandung memiliki hak untuk mengetahui orangtua kandungnya serta dibesarkan dan diasuh oleh kedua orangtua kandungnya (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Setiap anak memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Tujuannya agar dirinya dapat berkembang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- d. Setiap anak memiliki hak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang seumurannya dengan dirinya, bermain, berekreasi dan memiliki kreativitas sesuai dengan minat, bakat serta tingkat kecerdasannya demi perkembangan dirinya (Pasal 11).¹³

¹¹Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 1.

¹²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹³Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm. 698-700.

C. Hasil Penelitian

Penelitian tentang penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman yang terletak di Jalan Merapi Nomor.1, Beran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap selanjutnya, penulis melakukan penelitian dan pengambilan data berupa putusan pengadilan mengenai penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung, maka data tentang kasus penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman, terdiri atas:

Tahun	Jumlah kasus penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga
2013	2 kasus
2014	2 kasus
2015	2 kasus

Jumlah kasus yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan data yang telah dijabarkan tentang penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga, tidak dijelaskan secara spesifik siapa pelaku dan korban yang mengalami penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga. Data tersebut diperoleh penjelasan bahwa kasus tentang penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan (stagnant) dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Beberapa kasus yang telah di data seperti yang tertera dalam tabel diatas, penulis menguraikan 2 kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

Dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Sleman mengenai kasus penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana telah dijabarkan. Di Pengadilan Negeri Sleman, penulis mewawancarai bapak Ayun Kristiyanto, S.H. Beliau adalah salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sleman dan pernah menjadi hakim dalam kasus penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga. Beliau pernah menangani 2(dua)

kasus tentang penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga. Menurut beliau, bentuk penelantaran yang konkrit berupa tidak diberikan nafkah kepada keluarganya dan pergi meninggalkan rumahnya. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh seorang kepala keluarga yakni suami atau ayah kandung. Seorang ayah kandung/suami tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya.

Menurut hemat penulis, pendapat narasumber diatas sejalan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh ayah kandung dengan membiarkan anak kandungnya menjadi terlantar. Berdasarkan hukum yang berlaku diwajibkan bagi seorang ayah kandung untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak kandungnya.

Beliau juga berpendapat bahwa penelantaran tidak sama dengan pengabaian apabila ditinjau dari segi bahasa hukum, namun memiliki maksud yang sama. Penelantaran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan memiliki niat sehingga ia sama sekali tidak bertanggungjawab atas kewajibannya. Pengabaian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan memiliki dua kemungkinan yaitu disengaja dan tidak disengaja. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penelantaran diketahui olehnya, tetapi hal tersebut tidak ia sengaja atau tidak direncanakan. Pengabaian pada hakikatnya perbuatan yang tidak disengaja. Apabila diasumsikan bahwa pengabaian suatu perbuatan yang disengaja, akan tetapi sesungguhnya pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.

Menurut hemat penulis, pendapat dari narasumber tidak sejalan dengan pendapat para ahli pada saat melakukan seminar nasional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan dan UNICEF Indonesia. Menurut para ahli, penelantaran sama dengan pengabaian yaitu keadaan tidak terpenuhinya secara wajar kebutuhan manusia baik karena penundaan maupun pemenuhan yang sebagian maupun tidak terpenuhi sama sekali. Penelantaran dan pengabaian sama-sama memiliki unsur niat yang dapat merugikan korban.

Menurut pak Ayun Kristiyanto, S.H sebagai narasumber selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Penelantaran terhadap anak termasuk delik biasa yang berupa delik aduan namun bukan absolut dan hanya digunakan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Di dalam delik aduan, yang dapat melapor bukan hanya korban sebagai akibat penelantaran, akan tetapi bisa juga orang terdekat yang mengalami penelantaran.

Menurut hemat penulis, penelantaran dalam rumah tangga termasuk delik biasa bukan delik aduan. Di dalam delik biasa yang dapat melapor adalah setiap orang yang mengetahui, melihat dan mengamati secara langsung adanya penelantaran. Delik biasa, yang melakukan pelaporan tidak hanya korban. Delik aduan, yang dapat melapor adalah korban yang mengalami penelantaran.

Korban yang menjadi akibat adanya penelantaran adalah anak, melihat situasi yang demikian menurut hemat narasumber, maka pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan psikolog anak karena pengadilan tidak memiliki anggaran untuk hal tersebut. Kewenangan Undang-undang juga menyebutkan bahwa pengadilan tidak diwajibkan untuk menyediakan psikolog untuk anak, kecuali apabila hakim memiliki kebijakan lain. Pengadilan baru dapat menyediakan psikolog anak apabila anak sebagai pelaku tindak pidana. Agar anak tidak mengalami trauma secara berkepanjangan akibat dari penelantaran, orang terdekat dari korban dapat melaporkan ke lembaga perlindungan anak agar anak mendapatkan psikolog.

Menurut hemat penulis, seyogyanya hakim dalam melakukan proses pemeriksaan menghadirkan psikolog anak sebagai saksi ahli yang dapat dijadikan alat bukti yang sah (KUHP Pasal 184 ayat (1)). Hadirnya psikolog anak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Psikolog anak dalam persidangan dapat mengobati trauma pada anak yang dapat berdampak buruk pada fisiknya. Anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan jasmani, rohani dan sosial. Hal ini dapat berdampak pada hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara penelantaran yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung mengacu pada 3 hal yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Dari segi yuridis, hakim memakai dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari segi sosiologis, putusan yang akan diputuskan oleh hakim dapat memperkeruh keadaan atau memperjelas keadaan di dalam masyarakat. Dari segi filosofis, hakim mengacu pada latar belakang agama yang dianut oleh terdakwa.

Menurut hemat penulis, seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 B, sehingga berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Pasal 77 B bahwa sanksi diberikan bagi pelaku penelantaran berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sanksi kepada pelaku

penelantaran berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perbandingan antara kedua Undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih melindungi anak sebagai korban penelantaran dibandingkan sanksi yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena salah tujuan dari pemidanaan adalah menjerakan pelaku, jadi apabila sanksi yang diberikan kepada ayah kandung selaku pelaku penelantaran semakin berat maka pelaku akan jera melakukan perbuatannya.

Berdasarkan pendapat dari narasumber, maka penulis melakukan perbandingan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung antara kedua contoh kasus yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sleman. Menurut hemat penulis, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman pada kasus I dan kasus II terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis tidak sependapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, seharusnya hakim juga menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis juga tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran pada kasus I

dan kasus II. Pada kasus I, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Sanksi tersebut menurut penulis belum setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh korban, karena korban yaitu anak kandung mengalami kehilangan kasih sayang akan ayah kandungnya. Pemenuhan akan kebutuhan anak kandung juga tidak terpenuhi yaitu kebutuhan akan tumbuh kembang dan pemenuhan gizi yang baik selama kurun waktu 1 tahun.

Pada kasus II, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, namun hakim memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana selama masa percobaan 15 (lima belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana. Penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis juga belum maksimal dijatuhkan, karena anak kandung sebagai korban penelantaran oleh ayah kandung mengalami penderitaan secara psikis yakni kehilangan sosok ayah kandungnya selama 3 tahun lamanya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan tumbuh kembang anak kandung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut.

Penerapan sanksi oleh hakim terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung mendasar pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni menggunakan batas maksimal. Sanksi berupa hukuman percobaan, yakni: hukuman percobaan I diberikan selama 6 (enam) bulan dan hukuman percobaan II

diberikan selama 15 (lima belas) bulan dan ditambah ganti rugi secara materiil yang diberikan kepada anak.

5. REFERENSI

Buku:

Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Suhasril dan Makarao, Mohammad Taufik, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia Utama, Jakarta.

Sumiarni, Endang, 2003, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Syahrani, H.Riduan, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, cetakan ke-1, P.T.Alumni, Bandung.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Cetakan V, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297.

Website:

UU No 23 tahun 2004 ttg Penghapusan
KDRT, 30-09-2015, 13.00 wib.

uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-
perubahan-uu-pa.pdf, *Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak*, 09 September 2015, 19:11.